

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PMK.04/2016
TENTANG
DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY
DECLARATION*) ATAS NILAI PABEAN
UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

FORMAT PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)
UNTUK HARGA *FUTURES*

PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)
UNTUK HARGA *FUTURES*
Nomor(1).....

Nomor PIB :(2).....
Tanggal PIB :(3).....
Tanggal Penyelesaian (*Settlement Date*)
Harga *Futures* :(4).....

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp.....(5).....
2.	BMAD/BMI/BMTP*	Rp.....(6).....
3.	BMADS/BMIS/BMTPS*	Rp.....(7).....
4.	Cukai	Rp.....(8).....
5.	PPN	Rp.....(9).....
6.	PPnBM	Rp.....(10).....
7.	PPh Pasal 22	Rp.....(11).....
8.(12a).....	Rp.....(12b).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp.....(13).....

Untuk Nomor Item Barang :(14).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(15).....,(16).....
.....(17).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(18).....

Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai

Lembar 2 : Untuk importir

*) dipilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format: PI-(nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan).
Contoh : Importir PT.HCL dengan Nomor NIK 12345678 maka Nomor Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) PT. HCL adalah PI-001/12345678/2016.
- Nomor (2) : Diisi nomor pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (3) : Diisi tanggal pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (4) : Diisi tanggal penyelesaian (*settlement date*) Harga *Futures* sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB.
- Nomor (5) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (6) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP.
- Nomor (7) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs.
- Nomor (8) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai.
- Nomor (9) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (10) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (11) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (12a) : Diisi jenis pelunasan pembayaran lainnya misalnya Bunga.
- Nomor (12b) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya.
- Nomor (13) : Diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.
- Nomor (14) : Diisi nomor item barang yang diimpor dengan Harga *Futures* yang dilunasi kekurangan pembayarannya.
- Nomor (15) : Diisi tempat pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).
- Nomor (16) : Diisi tanggal pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).

Nomor (17) : Diisi nama jabatan penandatanganan.

Nomor (18) : Diisi nama penandatanganan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/PMK.04/2016
TENTANG
DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY
DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN
UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

FORMAT PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
UNTUK ROYALTI DAN PROCEEDS

PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
UNTUK ROYALTI/PROCEEDS*)
Nomor(1).....

Nomor PIB :(2).....
Tanggal PIB :(3).....
Tanggal Penyelesaian (Settlement Date) Pembayaran Royalti
dan/atau Proceeds* :(4).....

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp.....(5).....
2.	BMAD/BMI/BMTP*	Rp.....(6).....
3.	BMADS/BMIS/BMTPS*	Rp.....(7).....
4.	Cukai	Rp.....(8).....
5.	PPN	Rp.....(9).....
6.	PPnBM	Rp.....(10).....
7.	PPH Pasal 22	Rp.....(11).....
8.(12a).....	Rp.....(12b).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp.....(13).....

Untuk Nomor Item Barang :(14).....

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

.....(15).....,(16).....
.....(17).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....(18).....

Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai

Lembar 2 : Untuk importir

*) dipilih salah satu

LAMPIRAN
PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)
UNTUK ROYALTI/PROCEEDS
Nomor :(1).....
Tanggal :(16).....

RINCIAN PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*)

NO.	NOMOR PIB	TANGGAL PIB	BEA MASUK	BMAD/BMI/BMTP	BMADS/BMIS/BMTPS	CUKAI	PPN	PPNBM	PPH PASAL 22(12a).....	NOMOR ITEM BARANG
1.(19).....(20).....(21).....(22).....(23).....(24).....(25).....(26).....(27).....(28).....(29).....
2.
dst											
TOTAL		(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....(11).....(12b).....	

.....(17).....

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) sesuai penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format:
PI-(nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan)
Contoh : Importir PT.HCL dengan Nomor NIK 12345678
maka Nomor Pembayaran Inisiatifnya PI-001/12345678/2015
- Nomor (2) & (3) : Diisi "*Terlampir*" jika PIB lebih dari 1 (satu), jika hanya menggunakan 1 (satu) PIB maka nomor dan tanggal pendaftaran PIB diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (4) : Diisi tanggal penyelesaian Pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds* sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB.
- Nomor (5) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk.
- Nomor (6) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP.
- Nomor (7) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs.
- Nomor (8) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai.
- Nomor (9) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN.
- Nomor (10) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM.
- Nomor (11) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22.
- Nomor (12a) : Diisi jenis pelunasan pembayaran lainnya misalnya Bunga.
- Nomor (12b) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya.
- Nomor (13) : Diisi jumlah total pelunasan kekurangan pembayaran.
- Nomor (14) : Diisi "*Terlampir*" jika PIB lebih dari 1 (satu), jika hanya menggunakan 1 (satu) PIB maka nomor item barang yang diimpor mengandung Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilunasi kekurangannya diisi langsung pada kolom yang tersedia.
- Nomor (15) : Diisi tempat pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).
- Nomor (16) : Diisi tanggal pembuatan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).
- Nomor (17) : Diisi nama jabatan penandatanganan.
- Nomor (18) : Diisi nama penandatanganan.

- Nomor (19) : Diisi nomor PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (20) : Diisi tanggal PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).
- Nomor (21) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk per PIB.
- Nomor (22) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMAD/BMI/BMTP per PIB.
- Nomor (23) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran BMADS/BMIS/BMTPs per PIB.
- Nomor (24) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran Cukai per PIB.
- Nomor (25) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPN per PIB.
- Nomor (26) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPnBM per PIB.
- Nomor (27) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 22 per PIB.
- Nomor (28) : Diisi jumlah pelunasan kekurangan pembayaran lainnya per PIB.
- Nomor (29) : Diisi nomor item barang yang diimpor mengandung Royalti dan/atau *Proceeds* yang dilunasi kekurangan pembayarannya per PIB.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

